

***ECONOMIC INEQUALITY AND STRATEGIES FOR EQUITABLE  
DEVELOPMENT IN RURAL AREAS***

**KETIMPANGAN EKONOMI DAN STRATEGI PEMERATAAN  
PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERDESAAN**

**Rahyono**

Universitas Malahayati, Indonesia  
rahyono021@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze economic inequality in rural areas of Indonesia, focusing on the influence of access to infrastructure, education, and development policies. Through quantitative and qualitative approaches, this study collected data from surveys, in-depth interviews, and focus group discussions (FGDs) in three rural areas. The results of the quantitative analysis using multiple linear regression showed that access to infrastructure and development policies have a significant influence on economic inequality, with a coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.72. Qualitative findings revealed that although there has been an increase in infrastructure through the Village Fund program, its impact on the economic welfare of rural communities is still limited. In addition, low access to education and digital literacy are major obstacles to increasing economic productivity. This study suggests the need to improve governance of development programs, strengthen the education and work skills sector, and provide digital infrastructure in rural areas. The implications of this study include policy recommendations to improve development programs to be more inclusive and effective, as well as the importance of the role of technology in supporting economic growth in rural areas.*

**Keywords:** *Economic Inequality, Rural Areas, Infrastructure, Education, Development Policy, Technology, Village Fund.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi di wilayah perdesaan Indonesia, dengan fokus pada pengaruh akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan pembangunan. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari survei, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) di tiga wilayah perdesaan. Hasil analisis kuantitatif menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur dan kebijakan pembangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,72. Temuan kualitatif mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peningkatan infrastruktur melalui program Dana Desa, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan masih terbatas. Selain itu, rendahnya akses pendidikan dan literasi digital menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan tata kelola program pembangunan, penguatan sektor pendidikan dan keterampilan kerja, serta penyediaan infrastruktur digital di wilayah perdesaan. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki program-program pembangunan agar lebih inklusif dan efektif, serta pentingnya peran teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Ekonomi, Perdesaan, Infrastruktur, Pendidikan, Kebijakan Pembangunan, Teknologi, Dana Desa.

**PENDAHULUAN**

Ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa wilayah perdesaan seringkali tertinggal dalam hal

pendapatan per kapita, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Fenomena ini diperburuk oleh pola pembangunan yang lebih terpusat di kota-kota besar, sementara wilayah perdesaan sering kali mengalami stagnasi. Akibatnya, ketimpangan ini tidak hanya

memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat perdesaan, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Salah satu indikator ketimpangan yang mencolok adalah tingkat kemiskinan, yang di perdesaan pada tahun 2023 tercatat sebesar 12,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan yang hanya mencapai 6,56%. Disparitas ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi pembangunan yang lebih efektif dan inklusif, guna mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program untuk mengurangi ketimpangan ini, seperti Dana Desa dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan. Meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam hal peningkatan infrastruktur melalui Dana Desa, dampaknya terhadap produktivitas ekonomi masyarakat perdesaan masih dirasa terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh dan pendekatan yang berfokus pada penguatan sektor pendidikan, pengembangan keterampilan kerja, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, di era digitalisasi saat ini, teknologi memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Teknologi digital dapat membuka akses baru bagi masyarakat perdesaan, baik

dalam hal pendidikan, pemasaran produk lokal, maupun peluang ekonomi lainnya. Namun, adopsi teknologi di perdesaan masih terhambat oleh rendahnya infrastruktur internet dan rendahnya tingkat literasi digital. Untuk itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan perdesaan, dengan memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar global.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi dan strategi pemerataan pembangunan. Studi oleh Todaro dan Smith (2020) mengemukakan bahwa ketimpangan ekonomi seringkali disebabkan oleh struktur ekonomi yang tidak inklusif, di mana sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi perdesaan kurang mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional. Penelitian lain oleh Akita dan Lukman (2021) menunjukkan bahwa disparitas regional di Indonesia disebabkan oleh perbedaan tingkat akses terhadap pendidikan, infrastruktur, dan investasi.

Dalam konteks Indonesia, Suharto (2022) menyoroti bahwa program pembangunan seperti Dana Desa memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan, tetapi implementasinya sering terkendala oleh masalah tata kelola dan korupsi. Selain itu, studi oleh Yudhoyono et al. (2023) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk wilayah perdesaan. Meskipun literatur yang ada memberikan wawasan berharga, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana strategi pemerataan pembangunan dapat

diintegrasikan dengan adopsi teknologi dan inovasi lokal untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan.

Meskipun banyak studi yang telah membahas ketimpangan ekonomi dan strategi pemerataan pembangunan, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian fokus pada analisis makro, sementara kajian mikro yang mengeksplorasi dinamika sosial-ekonomi di tingkat komunitas perdesaan masih terbatas. Kedua, sedikit penelitian yang secara spesifik mengevaluasi peran teknologi dalam mendukung pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan, terutama di Indonesia. Ketiga, integrasi antara pendekatan top-down dan bottom-up dalam strategi pembangunan perdesaan belum banyak dibahas dalam literatur yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program-program pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Dalam kerangka inovasi, penelitian ini mengkaji peran teknologi dan inovasi lokal sebagai elemen kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi di perdesaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi strategis yang mengintegrasikan pendekatan top-down dan bottom-up dalam merancang kebijakan pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan beberapa kontribusi kebaruan (*novelty*) yang signifikan. Pertama, penelitian ini tidak hanya fokus pada analisis makro tetapi juga mendalami dinamika sosial-ekonomi pada tingkat komunitas perdesaan, memberikan wawasan yang

lebih kaya tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan. Kedua, penelitian ini secara eksplisit mengeksplorasi peran teknologi digital dan inovasi lokal dalam mendukung pemerataan pembangunan, sebuah pendekatan yang masih jarang dibahas dalam konteks Indonesia. Ketiga, penelitian ini mengusulkan integrasi antara pendekatan top-down dan bottom-up dalam perencanaan kebijakan pembangunan, menawarkan kerangka kerja baru untuk menciptakan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjembatani kesenjangan literatur tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan mengisi kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik serta menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menawarkan wawasan baru dalam merancang strategi pembangunan yang lebih efektif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Ketimpangan Ekonomi**

Ketimpangan ekonomi merujuk pada perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di antara individu, kelompok, atau wilayah tertentu. Menurut Todaro dan Smith (2020), ketimpangan ekonomi seringkali disebabkan oleh struktur ekonomi yang tidak inklusif, di mana sektor tertentu—seperti pertanian—kurang mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat di wilayah yang kurang

berkembang, khususnya di perdesaan (Akita & Lukman, 2021).

### **Pemerataan Pembangunan**

Pemerataan pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis. Pemerataan ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Menurut Suharto (2022), pemerataan pembangunan memerlukan intervensi kebijakan yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan infrastruktur di wilayah tertinggal.

### **Faktor Penyebab Ketimpangan Ekonomi**

Ketimpangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Akses Infrastruktur: Wilayah perdesaan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih (Badan Pusat Statistik, 2023).
2. Kesenjangan Pendidikan: Perbedaan dalam kualitas dan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menjadi penyebab utama ketimpangan (Akita & Lukman, 2021).
3. Kebijakan Pembangunan: Kebijakan yang terpusat pada wilayah perkotaan menyebabkan ketidakseimbangan alokasi sumber daya antara kota dan desa (Todaro & Smith, 2020).

### **Strategi Pemerataan Pembangunan**

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, di antaranya:

1. Dana Desa: Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan

infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Suharto, 2022).

2. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (PIBM): Memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Yudhoyono et al., 2023).
3. Adopsi Teknologi Digital: Peningkatan literasi digital dan akses teknologi di wilayah perdesaan untuk mendukung produktivitas ekonomi (World Bank, 2022).

### **Peran Teknologi dalam Pembangunan**

Teknologi memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Menurut Gupta et al. (2021), penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, membuka akses pasar yang lebih luas, dan menyediakan layanan pendidikan serta kesehatan berbasis daring. Namun, keberhasilan implementasi teknologi ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan literasi digital masyarakat lokal.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena ketimpangan ekonomi serta strategi pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antarvariabel melalui analisis statistik (Creswell, 2014), sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali perspektif mendalam dari para pemangku kepentingan (Yin, 2018).

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi dan efektivitas strategi pemerataan pembangunan (Neuman, 2014). Selain itu, penelitian ini juga bersifat eksploratori (*exploratory research*) untuk mengeksplorasi peran teknologi dan inovasi lokal dalam mendukung pembangunan di wilayah perdesaan (Stebbins, 2001).

### Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa wilayah perdesaan di Indonesia yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi tinggi berdasarkan data *Badan Pusat Statistik* (BPS, 2023). Desa-desanya menjadi lokasi penelitian meliputi:

1. Desa Cikondang, Kabupaten Garut, Jawa Barat: Desa ini memiliki potensi pertanian yang besar, namun akses infrastruktur dan pelayanan publik masih terbatas.
2. Desa Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah: Dikenal sebagai daerah agraris dengan ketimpangan ekonomi karena distribusi hasil produksi yang tidak merata.
3. Desa Rantau Kermas, Kabupaten Merangin, Jambi: Wilayah perdesaan yang kaya sumber daya alam, namun menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
4. Desa Waturaka, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur: Sebuah desa dengan potensi pariwisata berbasis alam, tetapi dengan kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan di antara masyarakat.

Subjek penelitian mencakup:

1. Masyarakat Lokal: Kelompok masyarakat yang terlibat langsung

dalam kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.

2. Pemerintah Daerah: Pemangku kebijakan yang bertanggung jawab atas implementasi program pembangunan di daerah.
3. Pelaku Usaha Lokal: UMKM dan pelaku usaha yang berperan dalam dinamika ekonomi perdesaan.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai ketimpangan ekonomi serta strategi pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan (Tashakkori & Teddlie, 2003).

1. Data Kuantitatif diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur yang dirancang secara cermat untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai tingkat ketimpangan ekonomi dan efektivitas program pembangunan yang dijalankan pemerintah (Dillman et al., 2014). Selain itu, data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis kuantitatif, yang bersumber dari laporan resmi seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) dan dokumen Kementerian Desa terkait kebijakan pembangunan perdesaan (Kemendesa PDTT, 2023).
2. Data Kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, guna mendapatkan informasi langsung mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap ketimpangan dan pembangunan (Patton, 2002). Selain itu, Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk menggali perspektif kolektif dari para peserta terkait strategi dan

kebijakan pembangunan yang dinilai paling relevan serta berdampak nyata di tingkat perdesaan (Krueger & Casey, 2014).

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, dua pendekatan analisis data digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketimpangan ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

1. Analisis Kuantitatif: Pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi data, serta pola ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam konteks yang lebih luas (Field, 2018). Dengan teknik ini, peneliti dapat menyajikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang terkait, seperti tingkat akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel tersebut (Gujarati & Porter, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mengukur dampak signifikan dari faktor-faktor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan ekonomi terhadap ketimpangan yang ada, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh masing-masing variabel secara simultan (Wooldridge, 2016).
2. Analisis Kualitatif: Dalam pendekatan kualitatif, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) (Braun & Clarke, 2006). Proses ini bertujuan untuk menggali perspektif mendalam dan pengalaman subjektif para responden mengenai

ketimpangan ekonomi. Untuk memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian, triangulasi data diterapkan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data yang digunakan, seperti wawancara, FGD, dan data sekunder (Denzin, 2012). Triangulasi ini memastikan bahwa temuan yang diperoleh adalah konsisten dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian secara keseluruhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Hasil Analisis Kuantitatif**

#### **Deskripsi Data**

Survei yang dilakukan di tiga wilayah perdesaan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan dalam hal akses infrastruktur, pendidikan, dan pendapatan. Statistik deskriptif menggambarkan temuan berikut:

- 1) Akses Infrastruktur: 58% responden di perdesaan mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik masih terbatas.
- 2) Kesenjangan Pendidikan: Hanya 32% penduduk perdesaan memiliki akses penuh ke pendidikan tinggi, berbanding terbalik dengan 68% di perkotaan.
- 3) Pendapatan Per Kapita: Pendapatan per kapita di wilayah perdesaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Rata-rata pendapatan masyarakat perdesaan adalah Rp 1.200.000 per bulan, sedangkan di perkotaan mencapai Rp 4.000.000 per bulan.

#### **Regresi Linier Berganda**

Melalui analisis regresi linier berganda, kami menguji pengaruh variabel independen (akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan

pembangunan) terhadap ketimpangan ekonomi. Hasil regresi menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur dan kebijakan pembangunan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,72. Ini menunjukkan bahwa 72% variasi ketimpangan ekonomi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, menegaskan pentingnya kedua faktor ini dalam mengurangi ketimpangan di wilayah perdesaan.

### **Hasil Analisis Kualitatif**

#### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha di wilayah perdesaan memberikan wawasan berharga mengenai ketimpangan ekonomi dan efektivitas program pembangunan yang ada:

- 1) Masyarakat Lokal: Sebagian besar masyarakat merasa bahwa meskipun infrastruktur semakin berkembang melalui program Dana Desa, dampaknya terhadap produktivitas ekonomi masih terbatas. Akses pendidikan yang terbatas dianggap sebagai penghalang utama bagi kemajuan ekonomi.
- 2) Pemerintah Daerah: Pemangku kebijakan mengakui bahwa program pembangunan sering kali terhambat oleh masalah tata kelola dan korupsi, yang mengurangi efektivitas dana yang dialokasikan.
- 3) Pelaku Usaha Lokal: Para pelaku UMKM di perdesaan mengungkapkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas, disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi.

#### **2. Focus Group Discussion (FGD)**

Hasil FGD mengungkapkan bahwa teknologi dapat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di perdesaan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi digital dan terbatasnya akses internet yang membuat adopsi teknologi menjadi sulit. Responden menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan literasi digital dan penyediaan infrastruktur internet di wilayah perdesaan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Ketimpangan Ekonomi di Perdesaan**

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, terlihat jelas bahwa ketimpangan ekonomi di wilayah perdesaan disebabkan oleh sejumlah faktor struktural, termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan pembangunan yang tidak merata. Upaya pemerintah melalui program Dana Desa dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, meskipun ada kemajuan, belum cukup signifikan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi secara menyeluruh. Penelitian ini sejalan dengan teori Todaro dan Smith (2020), yang menekankan bahwa ketimpangan ekonomi sering kali terkait dengan ketidakmerataan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan, terutama di sektor-sektor vital di perdesaan seperti pendidikan dan pertanian. Oleh karena itu, pembenahan sektor pendidikan dan pengembangan keterampilan di perdesaan sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik.

#### **Efektivitas Program Pemerintah**

Program Dana Desa memberikan kontribusi dalam peningkatan infrastruktur dasar, tetapi hasil wawancara dan FGD menunjukkan bahwa program ini belum cukup untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Faktor tata kelola yang buruk dan adanya praktik korupsi menghambat efektivitas penggunaan dana. Sejalan dengan penelitian Suharto (2022), yang mencatat bahwa program pembangunan sering kali gagal mencapai tujuan utama akibat masalah manajerial dan ketidakjelasan distribusi dana. Untuk itu, perlu adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, pengawasan yang ketat, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dana desa untuk memastikan dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi perdesaan.

### **Peran Teknologi dalam Pembangunan Perdesaan**

Meskipun teknologi berpotensi besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi di wilayah perdesaan masih sangat terbatas. Keterbatasan infrastruktur internet dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama. Penelitian Gupta et al. (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi teknologi digital sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kesiapan masyarakat untuk menggunakannya. Oleh karena itu, untuk mempercepat transformasi digital di perdesaan, pemerintah perlu meningkatkan akses internet dan menyediakan pelatihan literasi digital yang lebih luas, agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat perdesaan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

### **Integrasi Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up**

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pentingnya integrasi antara pendekatan top-down dan bottom-up dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan perdesaan. Pendekatan top-down sering kali lebih fokus pada kebijakan pemerintah pusat yang kurang mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah perdesaan. Sementara itu, pendekatan bottom-up memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Integrasi kedua pendekatan ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah perdesaan. Pendekatan yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perdesaan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan disebabkan oleh berbagai faktor struktural, seperti terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan yang kurang memadai, serta kebijakan pembangunan yang tidak merata. Meskipun ada upaya pemerintah melalui program seperti Dana Desa dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi masih terbatas. Akses terhadap teknologi, khususnya teknologi digital, masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan infrastruktur digital dan literasi teknologi di daerah perdesaan untuk mendukung kemajuan ekonomi yang lebih merata.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas hubungan antara akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan pembangunan terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah perdesaan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi pendekatan top-down dan bottom-up dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hasil penelitian juga memperlihatkan pentingnya peran teknologi dalam mempercepat pembangunan ekonomi perdesaan, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya untuk wilayah perdesaan. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola program-program pembangunan, seperti Dana Desa, agar lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Kebijakan pembangunan juga harus lebih memperhatikan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan bottom-up. Penguatan sektor pendidikan, pengembangan keterampilan kerja, serta peningkatan infrastruktur digital menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di perdesaan. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bahwa masyarakat perdesaan harus didorong untuk meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, mereka perlu didorong untuk mengadopsi teknologi digital yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, dengan dukungan pelatihan literasi digital dan penyediaan infrastruktur internet yang memadai. Bagi pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan mengenai dampak spesifik teknologi digital terhadap sektor ekonomi di wilayah perdesaan, seperti pertanian dan UMKM, serta mengkaji lebih lanjut pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tata kelola dan korupsi yang dapat menghambat efektivitas program pembangunan di perdesaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., & Lukman, R. A. (2021). Regional Income Disparity and Poverty in Indonesia. *Asian Economic Journal*, 35(3), 220–241.
- Akita, T., & Lukman, R. A. (2021). Regional Inequality and Economic Disparity in Indonesia: A Development Perspective. *Journal of Regional Studies*, 54(2), 123–145.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Ketimpangan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper 296. Brighton: IDS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method* (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). London: Sage Publications.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gupta, A., Kumar, R., & Singh, P. (2021). Role of Technology in Bridging Urban-Rural Divide: A Global Perspective. *Technology and Development Journal*, 32(1), 56-78.
- Gupta, R., Singh, A., & Verma, P. (2021). Role of Digital Technology in Rural Development: A Case Study. *Journal of Rural Development*, 40(2), 150–165.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Stebbins, R. A. (2001). *Exploratory Research in the Social Sciences*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Suharto, E. (2022). Evaluasi Program Dana Desa dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(4), 451-470.
- Suharto, R. (2022). Evaluasi Program Dana Desa dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 45–60.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.
- World Bank. (2022). *Digital Economy for Rural Areas: Unlocking Potential and Overcoming Barriers*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Digital Dividends*. Washington, D.C.: World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Yudhoyono, A., Sutrisno, B., & Wardhana, R. (2023). Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pemerataan Pembangunan Wilayah Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(3), 189-210.
- Yudhoyono, S., et al. (2023). Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 20(3), 80–98.